

PENGELOLAAN INFORMASI DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI

DITERBITKAN OLEH:
BALAI PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BANDUNG (BPPKI)
BADAN LITBANG SDM
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DAFTAR ISI

Topik Utama

- 1 Makna Keterbukaan Informasi di Ruang Publik pada Program Bedan Editorial Media Indonesia di Metro TV
Lucy Pujasari Supratman
- 11 Meneropong Produksi Media dan Idealisme Media dalam Keterbukaan Informasi
Sapta Sari
- 27 Pengelolaan Informasi oleh Badan Publik Pemerintah Paska Reformasi Birokrasi
C.Suprapti Dwi Takariani
- 41 PPID dan Transfer Informasi dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat
Syarif Budhirianto
- 51 Sistem Informasi Dana Kampanye Partai Politik Berbasis *Web* di Era Keterbukaan
Nana Suryana
- 59 Managemen Informasi suatu Alternatif Ditinjau dari Perspektif Teori Efek Komunikasi Massa
Sri Wahyuningsih

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

MAKNA KETERBUKAAN INFORMASI DI
RUANG PUBLIK
PADA PROGRAM BEDAH EDITORIAL
MEDIA INDONESIA DI METRO TV

Lucy Pujasari Supratman

*DISCLOSURE OF INFORMATION MEANING
IN THE PUBLIC AT
PROGRAM BEDAH EDITORIAL MEDIA
INDONESIA IN METRO TV*

Abstract

Editorial is the attitude of a mass media on one phenomenon or emerging discourse in society. In generally, the format of each editorial is in its own media private right. It contains of arguments that based on single truth from the mass media. Unlike Editorial Media Indonesia, it has a breakthrough visualizing its editorial to public sphere in television program. It is called Bedah Editorial Media Indonesia which 'totally' elaborate the content of editorial by opening interactive dialogue segment as the representation of the openness information era. Bedah Editorial Media Indonesia program carries assertive, straight forward and honest in delivering their voices based on interactive grand theory. It proposes neutrality in critical action by voicing the truth, especially national ideology, Pancasila (five basic principles of the Republic of Indonesia), four pillars of the nation and democratic values to the audiences.

Keywords: private rights, public sphere, Bedah Editorial Media Indonesia television program

Abstrak

Editorial merupakan sikap dari sebuah media massa pada peristiwa atau wacana yang tengah berkembang di masyarakat. Format setiap

editorial pada umumnya bersifat hak privat, berisi pendapat berdasarkan argumen-argumen yang merupakan sebuah kebenaran tunggal dari media massa tersebut. Berbeda halnya dengan Editorial Media Indonesia yang meneropong pada terobosan lain melalui visualiasi tajuk rencananya ke ruang publik televisi. Program yang diangkat ke layar kaca ini bernama Bedah Editorial Media Indonesia, pada akhirnya 'benar-benar' membedah konten editorial koran dengan membuka segmen dialog interaktif sebagai representasi dari era keterbukaan informasi. Program Bedah Editorial Media Indonesia yang mengusung tegas, lugas, dan jujur bersuara ini dalam dialog interaktifnya selalu berbasiskan grand teori dengan mengusung kenetralan dalam bersikap kritis dengan menyuarakan yang sebenarnya terutama ideologi tentang kebangsaan, pancasila, empat pilar bangsa, serta nilai-nilai demokrasi pada khalayak luas.

Kata kunci: hak privat, ruang publik, program Bedah Editorial Media Indonesia

MENEROPONG PRODUKSI MEDIA DAN
IDEALISME MEDIA DALAM KETERBUKAAN
INFORMASI

Sapta Sari

*MEDIA PRODUCTION AND IDEALISM
MEDIA Telescoped IN INFORMATION
DISCLOSURE*

Abstract

The mass media have a duty and obligation which is very important for society. The main task of journalism is to convey the truth.

KUMPULAN ABSTRAK

Delivering the truth is not an easy job, because there are factors that become an obstacle for example the interests media managers. Disclosure of the information is supported by the development of technology makes media managers compete to present information for the public. Media management is not just talk how to travel media itself since the conventional to the current interactive media, how media can carry out their duties as a theoretical perspective represented in the media, such as what is generated media production, how to media managers take advantage the disclosure of information in media production, as well as how the media itself a form of responsibility to the society associated with the production they produce.

Keywords: *media production, media idealism, disclosure of information.*

Abstrak

Media massa memiliki tugas dan kewajiban yang sangat penting bagi masyarakat. Tugas utama dari jurnalisme adalah menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran tersebut bukan pekerjaan mudah, karena ada faktor yang menjadi penghambat misalnya berbentur dengan kepentingan pengelola media. Keterbukaan informasi yang didukung dengan perkembangan teknologi membuat pengelola media berlomba menyajikan informasi untuk masyarakat. Pengelolaan media tidak saja berbicara bagaimana perjalanan media massa itu sendiri sejak era konvensional sampai media interaktif saat ini, bagaimana media bisa menjalankan tugasnya seperti yang tergambar dalam perspektif teoritis media, seperti apa produksi media yang dihasilkan, bagaimana pengelola media memanfaatkan keterbukaan informasi dalam produksi medianya, serta bagaimana bentuk tanggungjawab media itu sendiri kepada masyarakat berkaitan dengan produksi yang mereka hasilkan kepada masyarakat.

Kata kunci: produksi media, idealisme media, keterbukaan informasi.

PENGELOLAAN INFORMASI OLEH BADAN PUBLIK PEMERINTAH PASKA REFORMASI BIROKRASI

C.Suprapti Dwi Takariani

INFORMATION MANAGEMENT BY THE PUBLIC GOVERNMENT AFTER BUREAUCRACY REFORM

Abstract

Reform of the bureaucracy was born as a form of various side desire to create a government that is clean and transparent or good governance. The consequence is the need for openness in providing information that needed by the public. Because of the public or the people has the right to obtain information and the rights guaranteed by the law. To achieve this goal it is necessary to manage the information to be easily access by the public or the people. By utilizing the development of communication and information technology. Public agency could build an information systems ICT-based, but until now not all public bodies has implement them. Lack of infrastructure and human resources in the field of ICT be obstacles.

Keywords: *information management, Public Government, bureaucracy reform..*

Abstrak

Reformasi birokrasi lahir sebagai wujud dari keinginan berbagai pihak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan atau *good governance*. Konsekuensi dari hal tersebut adalah perlunya keterbukaan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh

KUMPULAN ABSTRAK

masyarakat. Karena publik atau masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan pengelolaan informasi agar mudah diakses oleh publik atau masyarakat. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, Badan Publik bisa membangun sebuah sistem informasi berbasis TIK, namun hingga saat ini belum semua Badan Publik melaksanakannya. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang TIK menjadi kendalanya.

Kata kunci: pengelolaan informasi, Badan Publik, reformasi birokrasi.

PPID DAN TRANSFER INFORMASI DALAM PERSPEKTIF KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI JAWA BARAT

Syarif Budhirianto

PPID TRANSFER INFORMATION AND PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE IN PERSPECTIVE IN WEST JAVA

Abstract

In building the PPID imaging in West Java Provincial Government as a means of information transfer towards a transparent and accountable government, public institutions need to be built user friendly that understands the needs of their communities, and can be easily accessed by the public . The relationship can be built with the education and training of human resources in the field of information and communication technology (ICT) as an agent of the provider, management , and dissemination of public information , so the faster realization of information management in facilitating the government to encourage the active participation of the community . Public interest is not limited to budget accountability

system , but in a broader perspective that can improve the quality of life . Community participation should be placed on the main role in any development that is in contact with the public interest . Administration . Jabar very open to people's aspirations and provide the widest possible space for it , but participation was not optimal when used only by certain segments of society.

Keywords: *PPID West Java Provincial Government, the transfer of information, public participation.*

Abstrak

Dalam membangun pencitraan PPID di Pemerintah Provinsi Jabar sebagai alat transfer informasi menuju pemerintah yang transparan dan akuntabel, perlu dibangun institusi publik yang *user friendly* yang memahami kebutuhan masyarakatnya serta dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Hubungan tersebut dapat dibangun dengan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai agen penyedia, pengelolaan, dan penyebaran informasi publik, sehingga terwujudnya informasi yang lebih cepat dalam memfasilitasi manajemen pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat. Kepentingan masyarakat tidak terbatas pada sistem pertanggungjawaban anggaran saja, tetapi dalam perspektif yang lebih luas lagi yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Partisipasi masyarakat harus ditempatkan pada peran yang utama dalam setiap pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan publik. Pemprov Jabar sangat terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat dan memberikan ruang seluas-luasnya untuk hal tersebut, namun partisipasi itu tidaklah optimal bila dimanfaatkan hanya oleh segmen masyarakat tertentu saja.

Kata kunci: PPID Pemerintah Provinsi Jabar, transfer informasi, partisipasi masyarakat.

KUMPULAN ABSTRAK

SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK BERBASIS *WEB* DI ERA KETERBUKAAN

Nana Suryana

SYSTEM INFORMATION CAMPAIGN FUND POLITICAL PARTIES WEB BASED IN THE ERA OF TRANSPARENCY

Abstract

Management of campaign finance in legislative elections before a lot of attention , because it felt covered up , patgulipat , not objective and not reported truthfully or not transparent . So to not happen again , at step 2014 legislative elections anticipated by implementing information systems web -based campaign finance or Campaign Fund Web - Based Information System (CFISWB) . Performance of this system is very effective , such as data processing (revenues and expenditures) start campaign funds of storage / archiving , and analyzing the publication can be done in an objective , open and very wide range pempublikasiannya . CFISWB application so that the support of the leadership of political parties , and many contributions to worthy utilized , in favor of honesty , objectivity and transparency . Supervision was easily done by anyone . Can then close opportunities , avoid suspicious transactions and detect all the illegal funds (funds deposit , investment , loan) are entered.

Keywords: information system, web-based and transparency.

Abstrak

Pengelolaan dana kampanye pada pemilu legislatif sebelumnya banyak sorotan, karena kesannya ditutup-tutupi, tidak objektif, dan tidak dilaporkan sejujurnya atau tidak transparan. Untuk tidak terulang lagi, pada

pemilu legislatif 2014 langkah antisipasinya dengan menerapkan sistem informasi dana kampanye berbasis web atau *Campaign Fund Information System Web-Based* (CFISWB). Kinerja sistem ini sangat efektif, seperti proses pengolahan data (penerimaan dan pengeluaran) dana kampanye mulai dari penyimpanan/pengarsipan, penganalisisan, dan publikasian dapat dilakukan secara objektif, terbuka dan jangkauan pempublikasiannya sangat luas. Sehingga penerapan CFISWB yang mendapat dukungan dari pimpinan Parpol, layak dimanfaatkan dan banyak kontribusinya, dalam mendukung kejujuran, keobjektifan dan keterbukaan. Pengawasan pun mudah dilakukan oleh siapa saja. Kemudian dapat menutup peluang, menghindari transaksi mencurigakan dan mendeteksi segala dana ilegal (dana titipan, investasi, pinjaman) yang masuk.

Kata kunci: sistem informasi, berbasis *web* dan keterbukaan.

MANAGEMEN INFORMASI SUATU ALTERNATIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI EFEK KOMUNIKASI MASSA

Sri Wahyuningsih

INFORMATION MANAGEMENT BASED ON AN ALTERNATIVE PERSPECTIVE THEORY OF MASS COMMUNICATION EFFECTS

Abstract

The television media has the main function to educate, entertain, influence. This function is a reference by the media actors and producers to compete to attract audiences in selecting channel programs presented on television. A growing number of local television and private television became intense competition in the media industry. It is very motivating players and media producers to get creative in the

KUMPULAN ABSTRAK

making of television programs for children up to adult movies, soap operas, talk shows, infotainment, and other programs, but it is a pity they do not pay attention to media management that the existing rules the KPI, P3SPSS, LSF, as well as segmentation, time, method of presentation and duration. Ideology market like this is happening in the State of Indonesia. So the shows that are presented do not rule out the possibility to have a negative effect on the audience. Analysis of the underlying theory is the theory of mass communication effects of stimulus response, agenda setting, and the theory of catharis.

Keywords: television, information, ideology market, theories of Mass Communication Effects

Abstrak

Media televisi mempunyai fungsi utama mendidik, menghibur, memengaruhi. Fungsi inilah yang menjadi acuan oleh para pelaku media dan para produser untuk berlomba-

lomba menarik khalayak dalam memilih *channel* program acara yang disajikan di televisi. Semakin banyak televisi lokal dan televisi swasta menjadi persaingan yang ketat dalam industri media. Hal ini sangat memotivasi para pelaku media dan para produser untuk semakin kreatif dalam membuat program acara di televisi dari film untuk anak hingga dewasa, sinetron, *talk show*, *infotainment*, dan program acara lainnya, tetapi yang disayangkan mereka tidak memerhatikan manajemen medianya yaitu aturan yang ada dalam KPI, P3SPSS, LSF, begitu pula dengan segmentasi, waktu, metode penyajiannya dan durasinya. Idiologi pasar seperti ini yang terjadi pada negara Indonesia. Sehingga tayangan-tayangan yang disajikan tidak menutup kemungkinan mempunyai efek negatif untuk khalayaknya. Analisis teori yang melandasinya adalah teori Efek Komunikasi Massa, *Stimulus Respon*, *Agenda Setting*, dan teori Kataris.

Kata Kunci: televisi, informasi, idiologi pasar, teori Efek Komunikasi Massa.

PENGELOLAAN INFORMASI DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI

Era reformasi yang telah di gulirkan beberapa waktu yang lalu, telah mendorong berbagai elemen masyarakat untuk menuntut hak dasar mereka khususnya hak untuk memperoleh informasi. Informasi merupakan hak pokok setiap orang baik dalam rangka mengembangkan kualitas pribadinya maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Pada masyarakat modern, kebutuhan akan informasi semakin mendesak dan semakin penting.

Cartwright et al.(2001) mengatakan, dalam era persaingan global, entitas yang bisa bertahan dan mengambil keuntungan dri persaingan itu adalah entitas yang menguasai sebanyak mungkin informasi. Entitas tersebut bisa berupa individu, badan hukum, atau juga negara. Informasi dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan. Urgensinya semakin nyata dalam relasi-relasi bisnin internasional, di mana informasi dipergunakan untuk banyak tujuan. Informasi pada dasarnya dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, menerima, dan menggunakan informasi itu untuk memastikan pemahaman umum manusia, dan menggunakannya sebagai sarana penambah pengetahuan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dengan mudah bisa didapatkan dan hadir menyapa kita setiap saat. Meskipun perkembangan teknologi telah memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi, namun masih ada beberapa informasi yang juga dibutuhkan oleh masyarakat, terutama informasi yang berkaitan dengan ranah publik. Keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi momen penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Bagi masyarakat Undang-Undang KIP merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sedangkan bagi pemerintah dan Badan Publik Undang-Undang KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka sudah selayaknyalah Badan Publik untuk bisa mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat, dan murah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Observasi edisi Juni 2014, menyajikan beberapa tulisan dengan tema “Pengelolaan Informasi di Era Keterbukaan Informasi” yang berisikan berbagai pandangan tentang bagaimana media massa dan juga Badan Publik mengelola informasi agar bisa dengan mudah dan cepat diakses oleh masyarakat. Ada sedikit perubahan dalam Observasi edisi kali ini yang hanya berisi 6 (naskah) dan perubahan pada halaman judul.

PENGELOLAAN INFORMASI OLEH BADAN PUBLIK PEMERINTAH PASKA REFORMASI BIROKRASI

C.Suprapti Dwi Takariani

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung
Jl Pajajaran No. 88 Bandung-Jawa Barat, Telp. 022-6017493, Fax. 022-6021740, HP. 08122179515
email: dwi.takariani@gmail.com

Naskah dikirim tanggal 19 Mei 2014, disetujui tanggal 26 Mei 2014

INFORMATION MANAGEMENT BY THE PUBLIC GOVERNMENT AFTER BUREAUCRACY REFORM

Abstract

Reform of the bureaucracy was born as a form of various side desire to create a government that is clean and transparent or good governance. The consequence is the need for openness in providing information that needed by the public. Because of the public or the people has the right to obtain information and the rights guaranteed by the law. To achieve this goal it is necessary to manage the information to be easily access by the public or the people. By utilizing the development of communication and information technology. Public agency could build an information systems ICT-based, but until now not all public bodies has implement them. Lack of infrastructure and human resources in the field of ICT be obstacles.

Keywords: information management, Public Government, bureaucracy reform..

Abstrak

Reformasi birokrasi lahir sebagai wujud dari keinginan berbagai pihak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan atau *good governance*. Konsekuensi dari hal tersebut adalah perlunya keterbukaan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena publik atau masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan pengelolaan informasi agar mudah diakses oleh publik atau masyarakat. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, Badan Publik bisa membangun sebuah sistem informasi berbasis TIK, namun hingga saat ini belum semua Badan Publik melaksanakannya. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang TIK menjadi kendalanya.

Kata kunci: pengelolaan informasi, Badan Publik, reformasi birokrasi.

Pendahuluan

Orde reformasi yang telah dicetuskan sejak tahun 1998 lalu, telah membawa perubahan di berbagai bidang. Di pemerintahan saat ini telah lahir reformasi birokrasi yang diharapkan dapat mengubah sistem pemerintah yang bersih dan transparan bebas dari unsur Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Pada era ini pula telah lahir Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diharapkan akan membawa negara Indonesia menuju *good governance*.

Paska diberlakukannya Undang-Undang KIP negara Indonesia memasuki babak baru, terutama dalam hal pelayanan informasi kepada publik. Selama ini badan publik terkesan tertutup dalam memberikan informasi yang diminta oleh publik, sehingga publik kesulitan untuk mencari informasi yang mereka butuhkan terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Susanto (2013) mengatakan bahwa melalui ketentuan Undang-Undang KIP, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terikat ataupun dikuasai oleh Badan-Badan Publik, harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik dalam rangka mengembangkan kualitas pribadi maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Setiap orang dalam kualitas dan latar belakang apapun membutuhkan informasi sesuai kadarnya. Pada masyarakat tradisional sekalipun, kebutuhan akan informasi akan tetap ada dan harus dipenuhi. Informasi tersebut bisa diperoleh melalui tatap muka dengan orang

lain, bisa juga melalui berbagai macam sarana yang tersedia (Subagiyo, dkk.2009).

Hak publik untuk mendapatkan informasi sebenarnya merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dan wajib disebarluaskan kepada publik. Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 28 F secara tegas menyebutkan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Sementara itu dalam pasal 3 Undang-Undang KIP disebutkan bahwa pemerintah:

- 1.Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- 2.Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- 3.Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- 4.Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- 5.Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
- 6.Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan/atau;
- 7.Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas di Indonesia.

Ketentuan di atas, memperlihatkan bahwa sebenarnya pemerintah telah menjamin hak dari masyarakat untuk memperoleh segala informasi yang mereka butuhkan terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik. Namun hak tersebut kadang-kadang masih sulit didapatkan karena budaya organisasi yang cenderung tertutup di sebagian besar Badan Publik di Indonesia saat ini dan sudah terlanjur menguat, sekalipun Undang-Undang KIP telah diberlakukan.

Sejak Undang-Undang KIP diberlakukan, beberapa Badan Publik sedikit demi sedikit telah melakukan perubahan dalam hal pemberian informasi ke publik. Dari pengalaman para pelaksana kehumasan pemerintah, terlihat bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP, telah banyak masyarakat yang mengetahui dan memanfaatkannya, baik perseorangan maupun bersama-sama dalam suatu kelembagaan, untuk mendapatkan informasi publik tentang kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik. Hal ini memang dijamin serta ditegaskan dalam pasal 4 yang menyatakan, bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Informasi dimohon secara tertulis maupun langsung (Subadi, 2012).

Keterbukaan informasi yang berkembang dan kebutuhan informasi publik yang meluas akan mendorong semakin banyak lagi masyarakat yang memanfaatkan haknya untuk meminta informasi publik yang ingin diketahuinya. Tentu saja hal ini tidak bisa dianggap remeh oleh Badan Publik, karena sesuai ketentuan, permohonan masyarakat wajib dilayani bahkan dalam waktu yang sudah ditetapkan yaitu 10 hari kerja sejak

diterimanya permintaan (Pasal 22 ayat 7), meskipun dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja (Pasal 22 ayat 8).

Mengingat hal tersebut maka sebuah informasi perlu dikemas dan dikelola sedemikian rupa agar masyarakat mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan. Ketika sebuah informasi dikemas dengan baik, maka akan dapat mendukung berkembangnya partisipasi publik dan hubungan yang ideal antara masyarakat dengan pemerintah (Suprawoto, 2008). Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, pengelolaan informasi harus dilakukan secara serius oleh Badan Publik, khususnya Badan Publik Pemerintah. Dari uraian tersebut di atas maka permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana seharusnya Badan Publik Pemerintah mengelola informasi agar mudah diakses oleh publik paska reformasi birokrasi?

Pembahasan

Reformasi Birokrasi: Upaya Mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance*

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai reformasi birokrasi, akan diuraikan terlebih dahulu apa itu birokrasi. Birokrasi menurut Blau (1969) adalah cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya. Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan (Poerwadarminta, 1987). Birokrasi telah terlanjur dimaknai dengan ketidakbecusan, kelambanan, kekakuan, dan kecurangan yang berlangsung di kalangan pemerintah. Padahal pada saat

itu Weber menyebutkan bahwa birokrasi merupakan salah satu bentuk organisasi belaka. Penerapan birokrasi senantiasa dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi dimaksudkan sebagai satu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai peraturan (Santosa, 2012). Sementara itu reformasi didefinisikan sebagai perubahan radikal untuk perbaikan di berbagai bidang dalam suatu masyarakat atau negara (Santosa, 2012). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa reformasi birokrasi adalah perubahan radikal dalam bidang sistem pemerintahan.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas melalui pembagian kerja hirarkial dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat. Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi, dan sasaran startegis, agenda kebijakan, program, dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan terbangunannya sosok birokrasi dengan tugas dan pertanggungjawaban terbuka dan aksesif. Penyederhanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antaraparatur serta antaraparatur dengan masyarakat dan dunia usaha yang berorientasi pada kriteria

dan mekanisme yang impersonal terarah pada penerapan pelayanan prima (toro, 2011).

Reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Selain itu, reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* abad ke-21 (Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi, 2010). Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance*. Melihat pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah negara. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien tapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Toro, 2011).

Untuk melakukan reformasi birokrasi bukan suatu hal yang mudah, penciptaan *good governance* masih menemui banyak kendala yang bila dilihat masih cukup kompleks. Penerapan *good governance* menurut Gideon (2010), yang bertujuan untuk memberantas KKN, memberikan pelayanan prima kepada publik masih “jauh panggang dari api”. Sebagai contoh adalah masih adanya penilaian *Disclaimer* bagi instansi pemerintahan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hal menjadi bukti bahwa praktik KKN masih membudaya di instansi pemerintahan Indonesia. Ada beberapa hambatan yang menyebabkan masih lambannya penerapan reformasi birokrasi di Indonesia yang menurut Gideon (2010) adalah

sebagai berikut: (1) Terkait dengan profesionalisme aparat birokrasi pemerintah. Sementara itu untuk penerapan *good governance* diperlukan profesionalisme dari aparat birokrasi pemerintah. Profesionalisme tersebut ditandai dengan kompetensi dan tanggung jawab dalam melaksanakan tupoksinya; (2) Penegakan hukum yang masih lemah. Hal tersebut ditandai dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat birokrasi; (3) Pengawasan yang masih lemah terhadap kinerja aparat birokrasi, sehingga masih banyak dijumpai laporan akuntabilitas yang belum sesuai dengan kenyataannya; (4) yang terakhir adalah moralitas dari aparat birokrasi. Sebagus apapun aturan yang dibuat jika tidak dilaksanakan, hasilnya tentu saja tidak akan memuaskan.

Reformasi birokrasi yang sedang terjadi di Indonesia merupakan langkah positif untuk mewujudkan *good governance*. Salah satu poin penting dari reformasi birokrasi adalah adanya transparansi dan pelayanan prima pada publik, salah satu pelayanan penting di era reformasi birokrasi saat ini adalah pelayanan informasi. Untuk mewujudkan hal tersebut Badan Publik perlu melakukan langkah-langkah konkrit seperti mengelola informasi yang dibutuhkan oleh publik dengan baik, agar pada saat publik membutuhkan Badan Publik dapat memberikannya secara cepat dan murah. Memanfaatkan perkembangan TIK merupakan hal yang bisa ditempuh oleh Badan Publik agar dapat memberikan layanan informasi yang cepat kepada publik.

Teori Difusi Inovasi

Kondisi perubahan sosial dan teknologi pada masyarakat telah melahirkan kebutuhan yang dapat menggantikan metode lama dengan metode baru. Metode baru di sini artinya adalah memanfaatkan perkembangan TIK untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam hal pemberian informasi ke masyarakat, instansi pemerintah sebagai Badan Publik sudah selayaknya mengikuti tren perkembangan tersebut. Artinya Badan Publik sudah selayaknya mengelola informasi dengan menggunakan media baru seperti internet. Kecepatan, kemudahan, dan keakuratan dalam mengakses data atau informasi menjadi hal penting mengingat hal tersebut telah menjadi keinginan publik. Pemanfaatan TIK untuk mengelola informasi oleh Badan Publik pemerintah merupakan suatu langkah positif dalam mengadopsi sebuah inovasi yang telah dikembangkan oleh para ahli. Teori Difusi Inovasi dalam mengelola informasi berbasis TIK tampaknya bisa diterapkan.

Teori Difusi Inovasi merupakan sebuah teori yang berisi tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru disebarkan dalam suatu budaya. Teori ini dikembangkan oleh Everett Rogers pada 1964 melalui buku yang ia buat sendiri dengan judul *Diffusion of Innovations*. Ia mendefinisikan difusi yang berperan sebagai proses di mana di dalamnya terdapat sebuah inovasi yang dikomunikasikan melalui berbagai jenis saluran serta jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Seperti yang dikatakan oleh Rogers (1961), yaitu "*as the process by which an innovation is communicated through certain channels*

over time among the members of a social system.” Lebih jauh dijelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan baru, atau dalam istilah Rogers (1961) difusi menyangkut “*which is the spread of a new idea from its source of invention or creation to its ultimate users or adopters*” (Zoraya, 2014).

Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses Difusi Inovasi terdapat 4 (empat) elemen pokok, yaitu:

1. Inovasi; gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep 'baru' dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali.

2. Saluran komunikasi; 'alat' untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber, paling tidak perlu memerhatikan (a) tujuan diadakannya komunikasi dan (b) karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat, dan efisien, adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal.

3. Jangka waktu; proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu

terlihat dalam (a) proses pengambilan keputusan inovasi; (b) keinovatifan seseorang: relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi; dan (c) kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial.

4. Sistem sosial; kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama (Ardianto, dkk, 2007).

Lebih lanjut, teori yang dikemukakan Rogers (1995) memiliki relevansi dan argumen yang cukup signifikan dalam proses pengambilan keputusan inovasi. Teori tersebut antara lain menggambarkan tentang variabel yang berpengaruh terhadap tingkat adopsi suatu inovasi serta tahapan dari proses pengambilan keputusan inovasi. Variabel yang berpengaruh terhadap tahapan difusi inovasi tersebut mencakup: (1) atribut inovasi (*perceived attribute of innovation*); (2) jenis keputusan inovasi (*type of innovation decisions*); (3) saluran komunikasi (*communication channels*); (4) kondisi sistem sosial (*nature of social system*); dan (5) peran agen perubah (*change agents*).

Sementara itu tahapan dari proses pengambilan keputusan inovasi mencakup:

1. Tahap munculnya pengetahuan (*knowledge*) ketika seorang individu (atau unit pengambil keputusan lainnya) diarahkan untuk memahami eksistensi dan keuntungan/manfaat dan bagaimana suatu inovasi berfungsi;

2. Tahap persuasi (*persuasion*) ketika seorang individu (atau unit pengambil keputusan lainnya) membentuk sikap baik atau tidak baik;

3. Tahap keputusan (*decisions*) muncul ketika seorang individu atau unit pengambil

keputusan lainnya terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada pemilihan adopsi atau penolakan sebuah inovasi;

4. Tahapan implementasi (*implementation*), ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya menetapkan penggunaan suatu inovasi;

5. Tahapan konfirmasi (*confirmation*), ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya mencari penguatan terhadap keputusan penerimaan atau penolakan inovasi yang sudah dibuat sebelumnya (Ardianto, dkk, 2007).

Pada awalnya, bahkan dalam beberapa perkembangan berikutnya, teori Difusi Inovasi senantiasa dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Inovasi merupakan awal untuk terjadinya perubahan sosial, dan perubahan sosial pada dasarnya merupakan inti dari pembangunan masyarakat. Rogers dan Shoemaker (1971) menjelaskan bahwa proses difusi merupakan bagian dari proses perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses di mana perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Perubahan sosial terjadi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu: (1) Penemuan (*invention*), (2) difusi (*diffusion*), dan (3) konsekuensi (*consequences*). Penemuan adalah proses di mana ide/gagasan baru diciptakan atau dikembangkan. Difusi adalah proses di mana ide/gagasan baru dikomunikasikan kepada anggota sistem sosial, sedangkan konsekuensi adalah suatu perubahan dalam sistem sosial sebagai hasil dari adopsi atau penolakan inovasi (Mulyana, 2009).

Media baru atau internet merupakan sebuah ide atau gagasan baru dalam bidang TIK yang kemudian berkembang dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat luas, tak terkecuali instansi pemerintah.

Pemanfaatan TIK di bidang pemerintah sangat membantu dalam memberikan pelayanan kepada publik. Berkaitan dengan reformasi birokrasi yang menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas, kehadiran media baru atau internet merupakan sebuah inovasi yang bisa diadopsi oleh pemerintah dalam hal ini Badan Publik pemerintah, untuk memberikan layanan yang prima ke masyarakat. Berkaitan dengan informasi, maka informasi akan dengan cepat dan mudah diakses oleh masyarakat/publik, jika instansi/Badan Publik memanfaatkan perkembangan TIK untuk mengelola informasi.

Pengelolaan Informasi Berbasis TIK: Kemudahan dan Kecepatan Akses Informasi

Perkembangan teknologi komunikasi dan informatika yang begitu pesat dewasa ini, telah membawa perubahan dalam organisasi pemerintahan dan telah mengubah pendekatan organisasi pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal tersebut tentunya akan membawa konsekuensi bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Keberadaan media baru tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi dan komunikasi. Internet sebagai sebuah produk teknologi komunikasi, meski sudah berkembang beberapa puluh tahun yang lalu, namun masih menjadi perbincangan publik hingga sekarang (Raharjo, 2011).

Teknologi komunikasi adalah peralatan yang berbentuk piranti keras, struktur organisasi, dan nilai-nilai sosial yang dapat dimanfaatkan oleh individu untuk mengumpulkan, memroses, dan mempertukarkan informasi dengan individu lain (Rogers, 1986 dalam Raharjo,

2011). Dari asal katanya, teknologi berasal dari Bahasa Latin *texere* yang berarti menyusun atau membangun, sehingga teknologi tidak seharusnya dibatasi pada penggunaan mesin-mesin saja. Teknologi merupakan suatu desain untuk tindakan instrumental yang berfungsi mengurangi “ketidakpastian” dalam hubungan sebab-akibat yang mungkin terjadi dalam upaya pencapaian hasil yang diharapkan.

Rogers (1986) dalam Raharjo (2011) menguraikan tiga ciri utama yang menandai kehadiran teknologi komunikasi baru yakni, *interactivity*, *de-massification*, dan *asynchronous*. *interactivity* merupakan kemampuan sistem komunikasi baru (biasanya berisi sebuah komputer sebagai komponennya) untuk berbicara balik, *talk back*, kepada penggunanya, hampir seperti seorang individu yang berpartisipasi dalam sebuah percakapan. Dalam ungkapan lain, media baru memiliki sifat interaktif yang tingkatannya mendekati sifat interaktif pada komunikasi antarpribadi secara tatap muka. Media komunikasi yang interaktif ini memungkinkan para partisipannya dapat berkomunikasi secara lebih akurat, lebih efektif, dan lebih memuaskan.

Sifat kedua dari teknologi komunikasi baru adalah *de-massification* atau tidak bersifat massal. Maksudnya, suatu pesan khusus dapat dipertukarkan secara individual di antara para partisipan yang terlibat dalam jumlah yang besar. *De-massification* ini juga bermakna bahwa kontrol atau pengendalian sistem komunikasi massa biasanya berpindah dari produsen pesan kepada konsumen media.

Ciri ketiga dari teknologi komunikasi baru adalah *asynchronous*. Karakteristik ini bermakna bahwa teknologi komunikasi baru mempunyai kemampuan untuk mengirimkan dan menerima pesan pada

waktu-waktu yang dikehendaki oleh setiap individu peserta.

Badan Publik sebagai salah satu instansi yang mempunyai tugas utama memberikan pelayanan kepada publik sudah saatnya melakukan berbagai inovasi agar dapat memberikan pelayanan secara prima. Inovasi yang bisa dilakukan adalah dengan mengadopsi infrastruktur TIK yang bisa dimanfaatkan untuk mengelola informasi. IRust dan Kannan, (2002), dalam Suprawoto, (2008), mengatakan fakta menunjukkan bahwa layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi memudahkan masyarakat dalam mengakses beragam jenis layanan, baik dengan perangkat komputer, jaringan seluler atau telepon bergerak.

Pengelolaan informasi yang baik merupakan salah satu wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Di titik inilah, sejalan dengan konteks pelayanan informasi publik, diperlukan sistem layanan informasi publik yang memadai. Sistem informasi itu untuk meningkatkan aksesibilitas atau kemudahan memperoleh informasi, kualitas informasi, dan pengembangan manajemen organisasi (Lucas, 1987 dalam Suprawoto, 2008).

Meskipun masih banyak kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan TIK untuk mengelola informasi, baik faktor teknis (misalnya infrastruktur yang masih minim atau bahkan belum ada) maupun non teknis (seperti SDM TIK yang terbatas jumlahnya), namun hal tersebut perlu dilakukan mengingat pengelolaan informasi berbasis TIK saat ini merupakan suatu kebutuhan bukan hanya sekedar prestise atau *lifestyle* saja.

Pengelolaan informasi publik melibatkan pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi kepada publik. Tentu

dibutuhkan kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang efektif sehingga memungkinkan masyarakat/publik mampu mengakses dan memahami informasi yang disediakan (Suprawoto, 2008). Lebih lanjut dikatakan bahwa proses pengelolaan ini mencakup dua wilayah kegiatan penting, pertama penyediaan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses. Dan kedua, mengembangkan kolaborasi dan sinergi promosi dan pertukaran informasi antar lembaga yang ada. Berkaitan dengan penyediaan informasi, maka hal yang perlu dilakukan oleh Badan Publik pemerintah adalah bahwa informasi yang disediakan

merupakan informasi yang berkualitas dan sesuai dengan jenis informasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang KIP. O'Brien (1998) dalam Suprawoto (2008) mengidentifikasi beberapa atribut kualitas informasi yang akan membuat informasi publik lebih bernilai dan bermanfaat bagi publik penggunaannya. Pandangan O'Brien menjadi sangat relevan karena tiga dimensi, yaitu dimensi waktu, isi, dan bentuk informasi harus diperhitungkan dalam pengelolaan informasi publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Secara lebih lengkap, O'Brien membuat karakteristik kualitas informasi seperti yang terdapat di dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.
Atribut Kualitas Informasi

Dimensi Waktu	
Tak Terbatas Waktu	Informasi harus disediakan ketika diperlukan.
Terkini	Informasi harus termutakhirkan saat disediakan.
Frekuensi	Informasi harus disediakan sesering diperlukan.
Periode Waktu	Informasi dapat disediakan mengenai situasi yang lalu, terkini, dan waktu yang akan datang.
Dimensi Isi	
Akurasi	Informasi harus bebas dari salah.
Relevansi	Informasi harus terkait dengan kebutuhan publik khusus dan dalam waktu yang khusus pula.
Kelengkapan	Semua informasi yang diperlukan harus disediakan.
Singkat	Hanya informasi yang diperlukan yang harus disediakan.
Cakupan	Informasi dapat memiliki cakupan luas tertentu, fokus internal atau eksternal.
Performa	Performa informasi dapat dilacak dengan mengukur aktivitas yang terpenuhi, kemajuan yang ada, atau akumulasi sumber daya.
Dimensi Bentuk	
Kejelasan	Informasi harus disediakan dalam bentuk yang mudah dimengerti.
Detil	Informasi dapat disediakan secara lengkap atau dalam bentuk ringkas.
Urutan	Informasi dapat disusun dalam urutan yang jelas/tertentu.
Tampilan	Informasi dapat disajikan dalam bentuk narasi, angka, grafis, atau bentuk lain.
Media	Informasi dapat disediakan dalam bentuk dokumen tercetak, tampilan video, atau media lain.

Sumber: O' Brian (1998) dalam Suprawoto (2008).

Atribut kualitas informasi seperti yang disampaikan oleh O'Brian di atas, cukup relevan jika diterapkan oleh Badan Publik dalam mengelola informasi, karena pengelolaan informasi semenarik mungkin akan mengundang masyarakat untuk mengaksesnya. Dalam artian bahwa dalam mengelola informasi perlu diperhatikan *updating* data setiap waktu, jadi informasi yang tersedia selalu informasi yang *uptodate*. Memang tidak mudah untuk selalui memperbarui sebuah informasi, karena diperlukan sumber daya manusia yang khusus untuk itu, sehingga sudah selayaknya pula mulai dipikirkan untuk merekrut sumber daya manusia khusus untuk mengelola informasi agar informasi yang diinginkan atau diperuntukkan masyarakat merupakan informasi yang berkualitas.

Praktik Layanan Informasi oleh Badan Publik

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik semakin menguat.

Setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin

penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat.

Implementasi Undang-Undang KIP sebagai salah satu jalan menuju *good governance*, memang sudah banyak diimplementasikan oleh Badan Publik Pemerintah, namun belum semua Badan Publik pemerintah secara baik dan benar mengimplementasikannya, dalam arti masih banyak ketentuan dalam Undang-Undang KIP yang belum dilaksanakan seoptimal mungkin. Hal tersebut terbukti dari hasil penelitian telah penulis lakukan, memang sudah banyak Badan Publik pada instansi pemerintah yang telah membuat atau mengeluarkan Perda tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi salah satunya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cirebon. Pada tahun 2012 telah diterbitkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 41 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Maksud dan tujuan dari Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2012 ini adalah memberikan sebuah pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota yang dimaksudkan sebagai acuan dalam penyediaan pelayanan informasi yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pendokumentasian, serta penetapan PPID. Sehingga PPID dan PPID Pembantu mampu mengelola pendokumentasian dan penyampaian informasi secara akurat, tidak menyesatkan, cepat, tepat waktu, murah, dan sederhana. Melalui Perda atau Perwalkot yang dikeluarkan oleh masing-masing Badan Publik pemerintah, informasi dan dokumentasi yang akan disampaikan ke publik akan terkelola dengan baik dan informasi tersebut

merupakan informasi yang tentunya berkualitas, yang memang benar-benar dibutuhkan oleh publik.

Meskipun secara *de jure* Badan Publik pada instansi pemerintah khususnya di Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan peraturan yang berisi mengenai pedoman pelayanan informasi bagi publik, namun pada kenyataannya, layanan informasi seperti yang tertera pada Undang-Undang KIP belum dilaksanakan dengan optimal. Pada praktiknya masih banyak Badan Publik yang belum memberikan informasi yang dibutuhkan oleh publik atau terkesan masih menutup-nutupi informasi yang diminta oleh publik. Terlihat dari banyaknya sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Daerah (KID), karena kekecewaan publik yang tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya. Sengketa informasi yang masuk di KID Provinsi Jawa Barat, berdasarkan data dari KID Jawa Barat, jumlahnya terus meningkat, tahun 2011 jumlah sengketa informasi yang dilayangkan di KID berjumlah 101 sengketa, kemudian pada tahun 2012, jumlah sengketa informasi bertambah menjadi 178 sengketa, dan pada tahun 2013 sengketa informasi bertambah jumlahnya menjadi 284 sengketa informasi (KID Jabar, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang KIP memang tidak semua informasi bisa diberikan kepada publik, hal ini perlu dipahami oleh Badan Publik maupun publik sebagai pengguna informasi. Ada empat jenis informasi yakni :

1. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Berkala

Instansi pemerintah sebagai Badan Publik, wajib menyediakan informasi di bawah kewenangannya, yang mengandung kebenaran dan mudah dijangkau oleh

masyarakat. Informasi publik yang harus diumumkan secara berkala meliputi: informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, kinerja, laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur oleh peraturan perundangan.

Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik, paling singkat enam bulan sekali. Disampaikan dengan cara yang mudah dipahami masyarakat ataupun pengguna informasi.

2. Informasi yang Wajib Diumumkan Serta Merta

Mencakup informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Ketentuan ini, jika tidak ada penjelasan secara teknis dari peraturan di bawahnya, akan berpotensi sebagai pasal yang dipakai untuk berlindung Badan Publik, yang tidak mau membuka informasi tertentu yang ditafsirkan secara subjektif untuk kepentingannya.

Informasi yang bersifat serta merta adalah informasi yang spontan pada saat itu juga. Informasi ini tidak boleh ditahan dan direkayasa untuk kepentingan pencitraan Badan Publik, mengingat sifatnya yang mendesak dan penting untuk segera diketahui oleh masyarakat atau pengguna informasi.

3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Badan Publik wajib menyediakan delapan macam informasi publik, yang meliputi: (a) daftar informasi publik di bawah pengelolaannya; (b) hasil keputusan dan pertimbangan Badan Publik; (c) kebijakan berikut dokumen pendukung; (d) rencana kerja proyek; (e) perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; (f) kebijakan Badan Publik; (g) Prosedur kerja pegawai; dan (h) laporan pelayanan akses informasi.

Informasi yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat yang sebelumnya menjadi sengketa, dapat diakses oleh pengguna informasi publik, dengan ketentuan teknis dari Komisi Informasi.

4. Informasi yang Dikecualikan

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali delapan informasi publik yang menyangkut: (a) informasi publik, jika dibuka akan menghambat proses penegakan hukum; (b) mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat; (c) membahayakan pertahanan dan keamanan negara; (d) mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; (e) merugikan ketahanan ekonomi nasional; (f) merugikan hubungan kepentingan luar negeri, (g) mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi, dan (h) mengungkap rahasia pribadi.

Materi pengecualian informasi publik yang terdapat dalam Undang-Undang KIP, bukanlah sebagai ketentuan yang dipakai sebagai alat untuk menghindari dari kewajiban menyampaikan informasi kepada publik. Tetapi digunakan sebagai pedoman untuk memilah-milah informasi yang bersifat terbuka atau yang tertutup untuk diakses publik.

Keempat jenis informasi di atas merupakan jenis informasi yang perlu mendapatkan perhatian dari Badan Publik dan sudah semestinya ditaati, sebagai wujud dari pemberian layanan yang prima kepada publik.

Penutup

Reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia saat ini

merupakan dorongan untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*, di mana terjadi transparansi dan akuntabilitas di segala bidang terutama di bidang pemerintahan. Konsekuensi dari reformasi birokrasi adalah instansi pemerintah atau Badan Publik wajib memberikan layanan informasi kepada masyarakat seoptimal mungkin, sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi dapat terpenuhi. Terutama dengan lahirnya Undang-Undang KIP yang mengharuskan Badan Publik untuk membuka informasi yang diminta oleh masyarakat, meskipun tetap ada informasi yang tidak wajib untuk dibuka.

Perkembangan TIK yang begitu pesat dewasa ini, telah melahirkan sebuah media baru. Media tersebut menjadi tempat bagi Badan Publik pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik atau masyarakat, khususnya pelayanan informasi. Pengelolaan informasi berbasis TIK menjadi salah satu upaya bagi Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada publik atau masyarakat, karena hal tersebut akan memudahkan publik atau masyarakat mengakses informasi secara cepat dan murah, namun dalam kenyataannya belum semua Badan Publik mengelola informasi berbasis TIK, karena terkendala beberapa hal terutama keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang TIK.

Untuk mewujudkan *good governance* sudah saatnya pemerintah dalam hal ini Badan Publik pemerintah memanfaatkan perkembangan TIK dengan membangun sebuah sistem informasi yang berbasis TIK. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia di bidang TIK, pemerintah hendaknya mulai memikirkan untuk merekrut sumber daya manusia di bidang

TIK, agar kendala-kendala dalam mengelola informasi berbasis TIK bisa teratasi.

Diperlukan komitmen yang tinggi dari pejabat pada Badan Publik untuk dapat

memberikan pelayanan informasi kepada publik dengan benar-benar mengimplementasikan Undang-Undang KIP sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ardianto, Elvinaro, dkk.(2007).*Komunikasi Massa Suatu Pengantar*.Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Blau, A.Peter.(1969).*Bureaucracy in Modern Society*.New York:Random House.
- Poerwadarminta, W.J.S.(1987).*Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta:Balai Pustaka.
- Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.(2010).*Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025*. Jakarta.
- Raharjo, Turnomo.(2011). Isu-isu Teoritis Media Sosial. Dalam Junaedi, Fajar Ed.*Komunikasi 2.0 Teoritisasi dan Implikasi*.Yogyakarta:Mata Padi Pressindo.
- Santosa, Pandji.(2012).*Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*.Bandung:Refika Aditama.
- Subagiyo, Henri.(2009).*Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Edisi Pertama)*.Jakarta: Komisi Informasi Pusat.
- Susanti, Eko Harry.(2013). Media Relations dan Transparansi Informasi (Tinjauan terhadap Kesiapan Badan Publik dalam Pemberlakuan UU Keterbukaan Informasi Publik)Budianto dan Hamid Ed. *Ilmu Komunikasi Sekarang dan Tantangan Masa Depan*.Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Makalah:

- Suprawoto.(2008).*Akurat, Cepat, Mudah, dan Merata Sebuah Praptik Pengelolaan Informasi Publik*. Disampaikan pada Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke-1 di Bali 2-5 Desember 2008.

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Internet:

- Gideona, Hendrikus Triwibawanto.(2010). *Reformasi Birokrasi Pemerintah Menuju Good Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Tersedia dalam http://www.stialanbandung.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=271:reformasi-birokrasi-pemerintahan-menuju-good-governance-dalam-perspektif-administrasi-publik&catid=46:volume-vii-no2-tahun-2010&Itemid=63. Diakses tanggal 2 Mei 2014.

- Komisi Informasi Daerah. (2013). *KID Jabar terima 284 Pengajuan Sengketa Informasi*. Tersedia dalam <http://komisiinformasi.jabarprov.go.id/kid-jabar-terima-284-pengajuan-sengketa-informasi/> diakses tanggal 2 Mei 2014.
- Mulyana.(2009).*Teori Difusi Inovasi*. Tersedia dalam <http://wsmulyana.wordpress.com/2009/01/25/teori-difusi-inovasi/>, diakses tanggal 2 Mei 2014.
- Subadi, Temon.(2012). *Siapkah Badan Publik Menghadapi Keterbukaan Informasi Publik?*. Tersedia dalam <http://setkab.go.id/artikel-4915-siapkah-badan-publik-menghadapi-keterbukaan-informasi-publik.html>. Diakses tanggal 5 Februari 2014.
- Toro, Kuncoro. (2011). *Reformasi Birokrasi Di Indonesia*. Tersedia dalam <http://birokrasi.kompasiana.com/2011/10/04/reformasi-birokrasi-di-indonesia-398477.html> diakses tanggal 2 Mei 2014.
- Zoraya, Marsya.(2014).*Beberapa Teori dalam Pemanfaatan Teknologi*. Tersedia dalam <http://komunikasi.us/index.php/course/perkembangan-teknologi-komunikasi/1332-beberapa-teori-dalam-pemanfaatan-teknologi-komunikasi>, diakses tanggal 2 Mei 2014.

TENTANG PENULIS

C. Suprpti Dwi Takariani SH, M.Si, Semarang, 22 September 1965. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro Semarang Fakultas Hukum Jurusan Perdata. S2 diselesaikan di Universitas Padjadjaran Bandung, Fakultas Ilmu Komunikasi. Saat ini tercatat sebagai Peneliti Madya di Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI Bandung). Karya tulis yang pernah dipublikasikan antara lain " *Perilaku Pengguna Internet* ", Majalah Ilmiah Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 13 No. 1 Tahun 2010. Diterbitkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika RI Badan Litbang SDM Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung. " *Study Eksplanatori Survei Pengaruh Chatting Melalui Facebook Terhadap Komunikasi Tatap Muka Remaja Dalam Keluarga* ", Majalah Ilmiah Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 14 No. 2 Tahun 2011. Diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Badan Litbang SDM Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung. Tanggapan Masyarakat Penerima Fasilitas Universal Service Obligation (USO) Program Desa Punya Internet. Prosiding Seminar Tahun 2012, Diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Badan Litbang SDM Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung. Pengalaman di bidang penerbitan adalah sebagai ketua dewan redaksi mulai dari tahun 2009 hingga sekarang.

Lucy Pujasari Supratman, M.Si, lahir di Bandung, 17 November 1984. Menyelesaikan pendidikan S2 di Jurusan Ilmu Komunikasi, Unpad (2009). Mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Pasundan, Fakultas Ilmu Seni dan Sastra di Universitas Pasundan, Fakultas Sastra di Universitas Al-Ghifari serta Fakultas Ilmu Manajemen dan Komunikasi di Institut Manajemen Telkom. Pengajar BIPA/Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (Mahasiswa Luar Negeri yang Berasal dari Turki, Turkmenistan dan Afrika). Penelitian yang pernah dilakukan: *Teaching Method through Mnemonic* (Unpas), *Analyzing Metaphor in Maesa Ayu's Novel* (Unpas), dan *Ebonics Language to Indonesian University Students* (Unpad). Karya tulis yang pernah diterbitkan diantaranya: *What's Valentine (Reader's Letter)*, Harian Umum Galamedia, 2007), *Tinjauan Aplikasi Budaya Literasi pada Masyarakat 'SDM' Praliterasi* (Majalah Al-Mizan No.133/2007), *Model Pendidikan Undergraduate: Mengkritisi Pencekalan Kesetaraan HAM pada Kualitas Proses Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi di Indonesia* (Majalah Al-Mizan) dan editor lepas buku berjudul 'Media Penyiaran Televisi' dengan penerbit IMPP-Unpad. Karya-karya fiksinya pernah beberapa kali diterbitkan pula oleh Harian Umum Galamedia.

Drs. Nana Suryana, lahir di Bandung 27 Juli 1955. Menyelesaikan S1 di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung Fakultas Sosial Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Saat ini tercatat sebagai Peneliti Madya di Kantor Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Pengalaman menulis di Jurnal (Jurnal Penelitian Komunikasi Bandung, Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Banjarmasin), Observasi dan Prossiding, Seminar di BPPKI Bandung.

Sapta Sari, S.Sos., M.Si, lahir di Yogyakarta/21 September 1978. Menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Bengkulu Sumatera. Menempuh pendidikan S1 hingga selesai pada tahun 2005 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung – Konsentrasi Jurnalistik, S2 diselesaikan pada tahun 2009 di Universitas Padjadjaran Bandung – Konsentrasi Ilmu Komunikasi. Saat ini penulis mengabdikan sebagai dosen di Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung, Penulis dan Editor Lepas di Re!Media Service Bandung. Pengalaman menulis: "Aku dan kepribadian Indonesia" Detika Publishing 2007, "Keterampilan Menulis" Sinergi 2008, "Media Siaran TV: Di antara Masyarakat dan Kepemilikan Media " Jurnal Observasi Vol. 8 No.1 Depkominfo Bandung 2010, "Stereotip Bahasa dan Pencitraan Perempuan pada Iklan Kacamata Budaya Populer" Jurnal Observasi Vol. 10 No. 1 Depkominfo Bandung 2012

TENTANG PENULIS

Sri Wahyuningsih, S.Sos.,M.Si, Tuban, 2 Maret 1978, pendidikan formalnya diselesaikan di Univ. Muhammadiyah Malang (S1) bidang studi Ilmu Komunikasi pada tahun 2001, Univ. Padjadjaran Bandung bidang studi Ilmu Komunikasi pada tahun 2009. Saat ini tercatat sebagai pengajar pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo, Madura dengan jabatan fungsional Lektor/IIIc Penata Muda. Karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain adalah Makna Simbol Jilbab Kaum Perempuan diterbitkan dalam Syaikhuna Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam STAI Syaichona Cholil (Non Akreditasi) Vol. 6/No. 2/ Pebruari 2013, Infotainment Komunikasi Ghibah yang Terlarang diterbitkan Syaikhuna Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam STAI Syaichona Cholil (Non Akreditasi) Vol. 7/No. 1/ September 2013, Realitas Kejujuran Masyarakat dalam Iklan L.A Light di Televisi versi “Yang lain bersandiwara, Gue Apa Adanya” diterbitkan dalam Jurnal Komunikasi (Non Akreditasi) Vol VII No. 1

Drs. Syarif Budhirianto, lahir di Bandung, 7 Februari 1962. Pendidikan formal: Sarjana Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Jurusan Administrasi Negara, Universitas Katolik Parahyangan Tahun 1986. Pengalaman pekerjaan : tahun 1987 sampai dengan 1995 Pengajar di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Bandung dan aktif di Persyarikatan Muhammadiyah hingga sekarang. Tahun 1989 sampai sekarang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO) RI dan sejak tahun 1994 menjadi fungsional peneliti dengan kepakaran di bidang komunikasi dan media. Karya yang diterbitkan antara lain pengembangan *Jabar cyber provinces* sebagai media informasi dan komunikasi yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Komunikasi (Thn. 2013), Peran *Chief Information Officer* Dalam Kelembagaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Pemerintah Kota Depok (Thn. 2012).

PETUNJUK PENULISAN

Petunjuk Penulisan Naskah Observasi BPPKI Bandung

1. Umum

Observasi merupakan media yang terbit secara berkala dua nomor dalam setahun. Nomor 1 terbit setiap bulan Juni, nomor 2 terbit bulan November. Proses penerbitan nomor 1 berlangsung sejak awal Januari hingga Juni. Proses penerbitan nomor 2 berlangsung sejak Juni hingga November. Sebagai media pengembangan dan rekayasa ilmu yang berasal dari hasil pengamatan lapangan, pengalaman, telaahan, gagasan, tinjauan maupun kritik di bidang komunikasi, informatika, dan media.

Sasaran khalayak penyebaran ditujukan kepada masyarakat ilmiah, instansi pemerintah dan swasta serta pihak-pihak yang berminat.

Jenis tulisan berupa makalah, hasil kajian pemikiran dan, tinjauan kritis, di bidang komunikasi, informatika, dan media.

Redaksi menerima sumbangan naskah dari kalangan peneliti, akademisi, pengamat dan praktisi komunikasi, media, dan informatika. Naskah yang disumbangkan harus orisinal dan belum pernah dipublikasikan di media lain. Jika di kemudian hari diketahui ada naskah yang dimuat di jurnal atau media lain maka segala risiko menjadi tanggung jawab penulis. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia mengacu pada EYD.

Segala macam bentuk plagiasi menjadi tanggung jawab penulis dan yang bersangkutan tidak dipekenankan untuk mengisi penerbitan di BPPKI Bandung.

Setiap naskah yang masuk akan dikaji dan ditelaah oleh Dewan Redaksi. Naskah yang masuk tidak diterbitkan menjadi hak Redaksi dan tidak dapat diminta kembali. Untuk menentukan layak atau tidaknya sebuah naskah dimuat, semua naskah yang masuk ke redaksi Observasi akan ditelaah oleh Mitra Bestari sesuai dengan bidang kepakarannya. Untuk menjaga objektivitas maka setiap naskah yang di kirim ke Mitra Bestari dalam kondisi tanpa nama.

Setelah dalam bentuk *proof*, Penulis naskah diminta menandatangani lembar pernyataan persetujuan untuk dicetak menjadi jurnal.

2. Khusus

Format Penulisan:

- a. Naskah diketik dengan Souvenir Lt BT font 12 di atas kertas A4, spasi ganda melalui program *MS Word 2003/ Open Office Writer*.
- b. Naskah yang dikirim maksimal 20 halaman. Per halaman rata-rata sekitar 429 kata hingga 450 kata.
- c. Pengiriman dilakukan melalui *e-mail* (observasi.bppki.bandung@mail.kominfo.go.id) atau melalui *hard copy* (dilengkapi *soft copy/CDRW*) ke BPPKI Bandung, Jalan Pajajaran no: 88 Bandung – 40173, telp. 022-6017493.
- d. Naskah mengacu pada sistematika sebagai berikut: Judul; Nama Penulis (termasuk alamat instansi, nomor hp/faxs, *e-mail*); Abstrak; Kata kunci; Pendahuluan; Pembahasan; Penutup.

PETUNJUK PENULISAN

Penjelasan format penulisan:

Judul: Ditulis dengan singkat, padat, maksimal 10 sampai 12 kata (ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris). Isinya mencerminkan masalah pokok. Ditulis dengan huruf kapital font 14. Hindari judul penelitian dengan menggunakan kata-kata “Telaah”, “Studi”, “Pengaruh”, “Analisis”, dan sejenisnya. Hindari penggunaan kata kerja dan singkatan.

Nama Penulis (termasuk alamat instansi, nomor hp/faxs, e-mail, tgl kirim naskah):

Contoh:

Muhammad Zein Abdullah, S.Ip, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Jurusan Komunikasi, Universitas Haluoleo Kendari
Sulawesi Tenggara - 93232

Telp/Fax/HP (0401) 3192511, 081341877133, *e-mail:zein_unhalu@yahoo.co.id*

Naskah dikirim pada tanggal 7 Januari 2011

Abstrak: Ditulis dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia, maksimal 200 kata tanpa paragraph. Isinya harus mencerminkan latar belakang dan permasalahan, pembahasan dan implikasi. Abstrak bukan merupakan turunan dari pendahuluan.

Kata Kunci: Ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris di bawah abstrak. Terdiri atas 3 sampai 5 kata. Tidak harus kata tunggal, boleh kata majemuk. Ditulis dengan huruf kecil format miring (*Italic*). Bukan kata yang bersifat Umum. Contoh judul: Membangun Format Kemitraan Media Dalam Rangka Diseminasi Informasi. **Kata-kata kunci:** Kemitraan, Media, Diseminasi Informasi.

Pendahuluan: berisi tentang latar belakang masalah; pentingnya permasalahan tersebut untuk ditelaah lebih jauh;

Kerangka konsep/analisis: perspektif pemikiran/tinjauan, bingkai analitik yang digunakan.

Pembahasan: Secara substansial isinya mencakup telaahan terhadap permasalahan dengan bingkai analitik yang digunakan. Jika menggunakan tabel, maka bentuk tabel, hendaknya menggunakan tiga garis horisontal dan tidak menggunakan garis vertikal, tabel menggunakan nomor sesuai dengan urutan penyajian (Tabel 1 , dst), judul tabel diletakan di atas tabel dengan posisi di tengah (*centre justified*) contoh :

Tabel 1

Jenis Kelamin Responden

No Jenis Kelamin	Frekuensi
1. Laki-laki	25
2. Perempuan	25
Jumlah :	50

PETUNJUK PENULISAN

Sumber :

Penutup: isinya mencakup simpulan dan saran.

Cara pengutipan : menggunakan pola *bodynote*, yakni menuliskan nama belakang penulis buku yang dijadikan sumber dan tahun terbit buku tanpa disertai halaman.

Sumber bacaan hendaknya terdiri dari minimal 60% yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir ini, dan 40% bebas.

Tidak diperbolehkan menggunakan sumber dari wikipedia, blog yang kredibilitasnya kurang.

Daftar Pustaka: Daftar pustaka ditulis mengacu pada *Standard Harvard*.

Contoh:

1. Buku (satu penulis):

Berkman, R.I (1994) *Find It Fast: how to uncover expert Information on any subject*. New York: Harper Perennial.

2. Buku (dua penulis/lebih):

Moir, A. & Jessel, D. (1991) *Brain sex: the real difference between men and women*. London: Mandarin.

Cheek, J., Doskatsch, I., Hill, P. & Waish, L. (1995) *Finding out: Information Literacy for the 21st century*. South Melbourne: MacMillan Education Australia.

3. Editor atau Penyusun sebagai penulis:

Spence, B. ed. (1993) *Secondary School Management in the 1990s: Challenge and Change*. Aspects of Education Series, 48. London: Independent Publishers.

Robinson, W.F & Huxtable, C.R.R. eds. (1998) *Clinicopathologic principles for veterinary medicine*. Cambridge: Cambridge University Press.

4. Penulis dan Editor:

Breediove, G.K. & Schorfheide, A.M. (2001) *Adolescent pregnancy*. 2nd ed. Wleczorek, R.R. ed. White Plains (NY): March of Dimes Education Services.

5. Institusi, Perusahaan, Atau Organisasi sebagai penulis

UNESCO (1993) *General Information Programme and UNISIST*. Paris: Unesco, PGI-93/WS/22

6. Salah satu tulisan dalam buku kumpulan tulisan:

Porter, M.A. (1993) The Modification of Method in Researching Postgraduate Education. In: Burgess, R.G.ed. *The Research Process in Educational Setting: Ten case studies*. London: Falmer Press, pp. 35-47

7. Referensi kedua (buku disitasi dalam buku yang lain):

Confederation of British Industry (1989) Towards a skills revolution: a youth charter. London: CBI. Quoted In: Bluck, R., Hilton, A., & Noon, P. (1994) *Information skills In Academic libraries: a teaching and learning role in*

PETUNJUK PENULISAN

higher education. SEDA Paper 82. Birmingham: Staff and Educational Development Association, p.39

8. Prosiding Seminar Atau Pertemuan:

ERGOB Convergence on Sugar Substitutes, 1978. Geneva, (1979). *Health and sugar substitutes: proceedings of the ERGOB conference on sugar substitutes*, Guggenheim, B, ed. London: Basel.

9. Naskah yang dipresentasikan dalam seminar atau pertemuan:

Romonav, A.P. & Petroussenko, T.V. (2001) International book exchange: has It any future In the electronic age? In: Neven, J, ed. *Proceedings of the 67th IFLA Council and General Conference, August 16-25, 2001, Boston USA*. The Hague, International Federation of Library Association and Institutions, pp. 80-8.

10. Naskah seminar atau pertemuan yang tidak dikumpulkan dalam suatu prosiding:

Lanktree, C. & Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma Symptom Checklist for Children (TSC-C). *Paper presented at the meeting of the American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA*.

Haryo, T.S. & Istiadjid, M. (1999, September). Beberapa factor etnologi meningokel nasofrontal. *Naskah dipresentasikan dalam konggres MABI, Jakarta*.

11. Sumber referensi yang berasal dari makalah pertemuan berupa poster:

Ruby, J. & Fulton, C. (1993, June), Beyond redllning: Editing software that works. *Poster session presented at the annual meeting of the Society for Scholarly Publishing, Washington, DC*.

12. Ensiklopedia:

Hibbard, J.D., Kotler, P. & Hitchens, K.A. (1997) Marketing and merchandising, in: *The new Encyclopedia Britannica*, vol. 23, 15th revised ed. London: Encyclopedia Britannica.

13. Laporan Ilmiah atau Laporan Teknis diterbitkan oleh pihak pemberi dana/sponsor:

Yen, G.G (Oklahoma State University, School of Electrical and Computer Engineering, Stillwater, OK). (2002, Feb). *Health monitoring on vibration signatures. Final Report*. Arlington (VA): Air Force Office of AFRL.SRBLTR020123. Contract No.: F4962098100049.

14. Laporan Ilmiah atau Laporan Teknis diterbitkan oleh pihak Penyelenggara:

Yen, G.G (Oklahoma State University, School of Electrical and Computer Engineering, Stillwater, OK). (2002, Feb). *Health monitoring on vibration signatures. Final Report*. Arlington (VA): Air Force Office of AFRL.SRBLTR020123. Contract No.: F4962098100049.

15. Tesis atau Disertasi:

Page, S. (1999) *Information technology impact: a survey of leading UK companies*. MPhil. Thesis, Leeds Metropolitan University.

Istiadjid, M. (2004) *Korelasi defisiensi asam folat dengan kadar transforming growth factor.β1 dan insulin-like growth factor I dalam serum Induk dan tulang kepala janin tikus*. Disertasi, Universitas Airlangga.

PETUNJUK PENULISAN

16. Paten:
Phillip Morris Inc. (1981) *Optical perforating apparatus and system*. European patent application 0021165A1.1981-01-07.
17. Artikel Jurnal:
Bennett, H., Gunter, H. & Reld, S. (1996) Through a glass darkly: images of appraisal. *Journal of Teacher Development*, 5 (3) October, pp. 39-46.
18. Artikel Organisasi atau Institusi sebagai Penulis:
Diabetes Prevention Program Research Group. (2002) Hypertension, Insulin, and proinsulin in participants with Impaired glucose tolerance. *Hypertension*, 40 (5), pp. 679-86.
19. Artikel tidak ada nama penulis:
How dangerous is obesity? (1977) *British Medical Journal*, No. 6069, 28 April, p.1115.
20. Artikel nama orang dan Organisasi sebagai penulis:
Vallancien, G., Emberton, M. & Van Moorselaar, R.J; Alf-One Study Group. (2003) Sexual dysfunction In d, 274 European men suffering from lower urinary tract symptoms. *JUrol*, 169 (6), pp. 2257-61.
21. Artikel volume dengan suplemen:
Geraud, G., Spierings, E.L., & Keywood, C. (2002) Tolerability and safety of frovatriptan with short-and long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. *Headache*, 42 Suppl 2, S93-9.
22. Artikel volume dengan bagian:
Abend, S.M. & Kulish, N. (2002) The psychoanalytic method from an epistemological viewpoint. *Int J Psychoanal*, 83 (Pt 2), pp.491-5.
23. Artikel Koran:
Sadil, M. (2005) Akan timbul krisis atau resesi?. *Kompas*, 9 November, hal. 6.
24. Artikel Audio-visual (Film 35mm, Program Televisi, Rekaman, Siaran Radio, Video Casette, VCD, DVD):
Now voyager. (Film 35mm). (1942) Directed by Irving Rapper, New York: Warner.
Now wash your hands.(videocassette). (1996). Southampton: University of Southampton, Teaching Support & Media Services.
25. Naskah-naskah yang tidak dipublikasikan:
Tian, D., Araki, H., Stahl, E, Bergelson, J., & Kreitman, M. (2002) *Signature of balancing selection in Arabidopsis*.Proc Nati Acad Sci USA. In press.
26. Naskah-naskah dalam media Elektronik (Buku-buku Elektronik / e-books):
Dronke, P. (1968) *Medieval Latin and the rise of European love-lyric* [internet]. Oxford University Press. Available from: netLibrary <<http://www.netLibrary.com/urlapl.asp?action=summary&v=1&bookid=22981>> [Accessed 6 March 2001].
27. Artikel Jurnal Elektronik:

PETUNJUK PENULISAN

- Cotter, J. (1999) Asset revelations and debt contracting. *Abacus* [internet], October, 35 (5) pp. 268-285. Available from: <<http://www.ingenta.com>> [Accessed 19 November 2001].
28. Artikel dalam web pages:
Rowett, S. (1998) Higher Education for capability: autonomous learning for life and work [internet], Higher Education for Capability. Available from: <<http://www.lie.mdx.ac.uk/hec/about.htm>> [Accessed 8 August 2000].
29. Artikel dalam website:
Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat UGM. (2005) *Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat UGM* [internet]. Yogyakarta: S2 IKM UGM. Tersedia dalam: <<http://ph-ugm.org>> [diakses 8 November 2005].
30. Artikel dalam CD-ROM:
Picardle, J. (1998) I can never say goodbye. *The observer* [CD-ROM], 20 September, 1, Available from: The Guardian and Observer an CD-ROM. [Accessed 16 June 2000].
31. Artikel dalam Database Komputer:
Gray, J.M. & Courtenay, G. (1988) *Youth cohort study* [computer file]. Colchester: ESRC Data Archive (Distributor).
32. Artikel online images (informasi visual, foto, dan ilustrasi):
Hubble space telescope release In the space shuttle's payload bay. (1997) [Online Image]. <Available from: <http://explorer.arc.nasa.gov/pub/>> SPACE/GIF/s31-04-015.gif, [Accessed 6 July 1997].
33. Artikel dalam e-mail:
Lawrence, S. (slawrence.goyh@go-regions.gsi.gov.uk), 6 July 2001. *Re: government office for Yorkshire and Humberside Information*. Email to F.Burton (f.burton@leedsmet.ac.uk).

Media dan Pemilu Presiden Tahun 2014

Tahun ini Indonesia akan menggelar pesta demokrasi yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, setelah sebelumnya didahului dengan pemilihan anggota legislatif. Pemilihan presiden dan wakil presiden tahun ini akan menentukan pemerintahan Indonesia untuk lima tahun ke depan. Peran media dalam menyukseskan pemilu presiden tahun 2014 akan sangat menentukan dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

Observasi mengundang para pakar, akademisi, peneliti, dan praktisi untuk menulis sesuai topik di atas. Naskah bisa berupa resume laporan hasil penelitian, opini, telaahan teoritis, atau hasil pengamatan. Ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dilengkapi dengan abstrak dengan jumlah 100-150 kata. Diketik dengan menggunakan program MS Word 2003/Open Office dengan spasi 1,5 di atas kertas A4, panjang naskah antara 10-20 halaman, dilengkapi biodata penulis. Naskah harus asli dan belum pernah dipublikasikan media lain. Kutipan ditulis dengan sistem *endnotes*. Naskah dikirim dalam bentuk *hard copy* beserta *soft copy* ke alamat redaksi Observasi: Jl. Pajajaran No. 88 Bandung atau melalui *email*: observasi.bppki.bandung@mail.kominfo.go.id